



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 470/Kep.1208-Disdukcapil/2025 TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa petugas operator aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan Bandung Wali Kota Nomor Keputusan dengan 470/Kep.1768-Disdukcapil/2024 tentang Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan susunan tim kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung serta perpindahan penempatan petugas operator aplikasi SIAK yang sebagai admin pelayanan bertugas pengaduan masyarakat, sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sumber daya manusia SIAK antara lain terdiri dari operator aplikasi SIAK pada satuan kerja pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1478);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 4);
- 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 90);

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021, hal Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

.

Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KEDUA

- : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
 - a. mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kerahasiaan dan keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melakukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. melakukan pencetakan dokumen kependudukan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi data kependudukan;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - g. mengolah dan menyajikan data kependudukan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan

h. melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.

KETIGA

: Daftar nama Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 470/Kep.1768-Disdukcapil/2024 tentang Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 April 2025 WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP, 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 470/Kep.1208-Disdukcapil/2025
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT/GOL.
1.	Endah Susanti, S.Sos.	197004251992112001	Penata Tk. I/ III.d
2.	Elis Dewi Purwantini, A.Ks	197407262007012005	Penata Tk. I/ III.d
3.	Muzanni Ali Mahmud, S.Sos	197609092010011004	Penata Tk. I/ III.d
4.	Neti Nurbaety, SP	198003232010012003	Penata Tk. I/ III.d
5.	Juliati marminingsih, S.Sos	197007121999022001	Penata / III.c
6.	Rani Siti Hasanah, SE.	197110201994032002	Penata / III.c
7.	Omang Rochman, SE.	196810292007011006	Penata / III.c
8.	Ratna Martina, S.Sos, M.I.Kom	198503132015032004	Penata / III.c
9.	Yayan Mulyana, S.IP	197411102014111001	Penata / III.c
10.	Tanrianto Andhika Putra, S.I.Kom	199002142015031002	Penata / III.c
11.	Bella Wiraniskala, S.I.Kom., M.A., M.AP.	198601282015031002	Penata / III.c
12.	Nijam Zakhrifa, S.I.Kom	199007282015031001	Penata / III.c
13.	Tjipto Artono, S.E	197004152010011002	Penata / III.c
14.	Dian Fardiansyah, S.E	198010282010011002	Penata / III.c
15.	Ade Sasmita	197004081988111001	Penata Muda Tk. I/ III.b
16.	Angkeu Ratna Muslihat, A.Md	198301042009022001	Penata Muda Tk. I/ III.b
17.	Yani Sofyana	196806031993031012	Penata Muda Tk. I/ III.b
18.	Dewi Rachmi, S.IP	197310062007012005	Penata Muda Tk. I/ III.b
19.	Fredy Hermawan, SE	197705312014111001	Penata Muda Tk. I/ III.b
20.	Mattah Arizan Tan Sulaeman, S.Si	198509072014111001	Penata Muda Tk.I/ III.b
21.	Fatihah Rizqiyah, S.STP	199505272018082001	Penata Muda Tk.I/ III.b
22.	Ropik Hidajat	196902052009011001	Penata Muda Tk.I/ III.b
23.	Rudi Arisandy, SE	197907122010011001	Penata Muda/ III.a

24.	Yasyifa Maharani Maryun, S.M.	199804162022032021	Penata Muda/ III.a
25.	Sukirman, S.A.P	196903082010011002	Penata Muda/ III.a
26.	Dedi Mulyana, S.A.P	196907202007011012	Penata Muda/ III.a
27.	Wahyudin, S.A.P	196912172007011009	Penata Muda/ III.a
28.	Ujang Dedi, S.A.P	197705102008011004	Penata Muda/ III.a
29.	Farida Nursita,A .Md.	198510192014022002	Penata Muda/ III.a
30.	Budhy Rachayu, S.A.P	196808262007011013	Penata Muda/ III.a
31.	Djaelani, S.A.P	196809272007011006	Penata Muda/ III.a
32.	Adang Kurnia, S.A.P	197604202009011003	Penata Muda/ III.a
33.	Dodi Sudrajat	197002262008011001	Penata Muda/ III.a
34.	Mohamad Haerulmilah	197104242008011002	Penata Muda/ III.a
35.	Tisna Dinangun	196907172008011006	Penata Muda/ III.a
36.	Peri Mulyadi	198002012008011005	Penata Muda/ III.a
37.	Supriyanto	197503152009011004	Pengatur Tk.I/ II.d
38.	Rahmadi	197912032008011003	Pengatur/ II.c
39.	Yuceu Dini Auliana, A.Md	198002152022212003	Pengatur/ II.c
40.	Iyan Rustiana, A.Md	198306132022211001	Pengatur/ II.c
41.	Adang	197009102008011007	Pengatur Muda/ II.a
42.	Sumarna	198007012010011003	Pengatur Muda/ II.a
43.	Aceng Kurnia	196803182009011002	Pengatur Muda/ II.a

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

LUKMAN ARIEF, SH

Pembina 19760604 200604 1 00